

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu mengenai hubungan antara pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, pembiayaan utang, dan ukuran legislatif terhadap akuntabilitas bantuan sosial. Objek penelitian ini adalah pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang merealisasikan anggaran bantuan sosial selama tahun anggaran 2011-2013. Dari 38 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, diperoleh 35 kabupaten/kota yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel penelitian dengan tahun pengamatan selama 3 (tiga) tahun sehingga diperoleh jumlah observasi sebanyak 105.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan serta mengacu pada perumusan serta tujuan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh dari sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas bantuan sosial. Hal ini dikarenakan berdasarkan sistem pengendalian internal pemerintah yang diungkapkan pada laporan keuangan masih ada unsur-unsur yang belum dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

2. Tidak adanya pengaruh antara pembiayaan utang terhadap akuntabilitas bantuan sosial. Artinya besar atau kecilnya jumlah pembiayaan yang dimiliki suatu kabupaten/kota tidak mempengaruhi tingkat akuntabilitas bantuan sosial. Hal ini disebabkan karena peruntukan pembiayaan utang yang dimiliki kabupaten/kota belum tentu untuk pos bantuan sosial dan proporsi pembiayaan utang yang dimiliki oleh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sangat kecil.
3. Ukuran legislatif berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas bantuan sosial. Artinya semakin banyak jumlah anggota DPRD, tidak membuat tingkat akuntabilitas bantuan sosial yang disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) semakin tinggi. Hal ini disebabkan bahwa secara kuantitas, anggota DPRD yang banyak menimbulkan banyak kepentingan-kepentingan pribadi yang tidak sesuai kebutuhan sehingga tidak meningkatkan kualitas pengawasan yang dilaksanakan.

B. Implikasi

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa implikasi yang diharapkan dapat menjadi arahan untuk penelitian selanjutnya. Berikut beberapa implikasi dari penelitian ini:

1. Sistem pengendalian internal yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan hal penting yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan tidak terkecuali penyelenggaraan bantuan sosial. Penting bagi pemerintah untuk melaksanakan pengendalian internal,

khususnya dalam penyaluran bantuan sosial yang sesuai dengan Permendagri No. 32 Tahun 2011 juga dengan pencatatannya yang sesuai dengan Bultek No.10 Tahun 2011 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas bantuan sosial yang telah dilaksanakan.

2. Pembiayaan utang merupakan salah satu bentuk pendanaan pemerintah. Pemerintah yang memiliki pendanaan yang berasal dari pembiayaan utang harus membuat pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut. Ketika pemerintah menggunakan dana yang berasal dari pembiayaan utang untuk pos bantuan sosial, pemerintah harus membuat pertanggungjawaban bantuan sosial yang baik sesuai dengan peraturan sehingga pihak pemberi pinjaman dapat mengetahui bahwa dana yang telah diberikan digunakan dengan semestinya.
3. Lembaga legislatif memiliki 3 (tiga) fungsi yang salah satunya adalah fungsi pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan, dengan tidak memandang banyak sedikitnya jumlah anggota legislatif yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah, harus bisa membuat penyelenggaraan pemerintah yang berjalan tetap pada jalurnya termasuk dalam mengawasi pelaksanaan bantuan sosial dan juga mengawasi pertanggungjawaban yang dibuat oleh penyelenggara telah sesuai dengan peraturan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:

1. Sampel yang diambil peneliti hanya pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Mengingat sangat luasnya daerah yang ada di Republik Indonesia, sampel yang dipilih peneliti mungkin kurang dapat merepresentasikan kondisi yang sebenarnya ada pada pemerintah daerah di Indonesia. Karena hal ini, peneliti menyarankan untuk mengambil sampel yang cakupannya lebih luas sehingga dapat merepresentasikan kondisi di seluruh Indonesia.
2. Pada variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, peneliti hanya mengukur ada tidaknya unsur pengendalian internal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui pengungkapan yang ada pada laporan keuangan pemerintah daerah tersebut (data sekunder). Hal tersebut belum dapat menggambarkan seberapa baik pengendalian internal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Peneliti menyarankan untuk menggunakan metode penelitian lain, yaitu dengan menggunakan kuesioner sehingga didapatkan data primer yang lebih dapat menjelaskan bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian intern yang telah dilakukan pemerintah daerah.
3. Variabel pembiayaan utang sebagai salah satu sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas bantuan sosial. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat

menggunakan variabel dari sumber pendanaan yang lain seperti Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan atau variabel lain yang sekiranya memiliki pengaruh pada akuntabilitas bantuan sosial.

4. Variabel ukuran legislatif pada penelitian ini ternyata tidak menggambarkan kualitas pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD secara akurat. Menurut peneliti ada faktor lain yang sekiranya lebih mendukung kualitas pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD seperti, latar belakang, pengetahuan, pemahaman, serta komitmen dan integritas yang dimiliki oleh anggota DPRD itu sendiri.